

PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PEMBAGIAN HARTA WARIS DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DI KECAMATAN LAPPARIAJA KABUPATEN BONE

NOPI HATRIANI

Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Makassar
nopihatriani317@gmail.com

ABSTRAK

Nopi Hatriani, 2020. Persepsi Masyarakat terhadap Pembagian Harta Waris ditinjau dari Hukum Islam di Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone. Skripsi Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Univesitas Negeri Makassar. Dibimbing oleh Bapak Firman Umar selaku Pembimbing I dan Bapak Muh. Sudirman selaku Pembimbing II. Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mengetahui Pemahaman masyarakat terhadap pembagian harta waris Islam di Desa Sengeng Palie, 2) mengetahui Sikap masyarakat terhadap pembagian harta waris Islam di Desa Sengeng Palie. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini bertempat di Desa Sengeng Palie Kecamatan Lappariaja. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik wawancara, dan dokumentasi. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif, untuk menggambarkan persepsi masyarakat terhadap pembagian harta waris ditinjau dari hukum Islam di Desa Sengeng Palie. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Masyarakat kurang memahami pembagian harta waris secara hukum Islam, karena tidak semua masyarakat mempelajari lebih mendalam tentang Hukum Kewarisan Islam, serta kurangnya sosialisasi tentang pembagian harta waris Islam di Masyarakat. 2) Sikap masyarakat terhadap pembagian harta waris Islam di Desa Sengeng Palie yaitu, setuju dengan pembagian harta waris Islam dari segi perbandingan bagian laki-laki mendapat bagian lebih banyak dan perempuan mendapatkan bagian lebih sedikit. Setuju menggunakan pembagian harta waris dengan cara menunjukkan bagian masing-masing ahli waris sebelum meninggal dunia dan akan dimiliki sepenuhnya setelah pewaris meninggal dunia.

KATA KUNCI : Persepsi, Masyarakat, Pembagian Harta Waris, Hukum Islam

PENDAHULUAN

Indonesia adalah Negara hukum, hal ini dapat dilihat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat 3. Dengan demikian segala kegiatan dalam Negara ini harus berdasarkan hukum yang berlaku.

Indonesia merupakan Negara kepulauan yang terdiri dari beragam suku bangsa, agama, dan adat istiadat yang berbeda satu dengan yang lain. Hal ini mempengaruhi hukum yang berlaku pada setiap golongan masyarakat yang dikenal dengan hukum adat.¹

Hukum kewarisan dalam Islam sangat dipengaruhi oleh sistem yang dianut oleh masyarakat dengan corak kesukuan. Ciri-ciri tersebut sudah menjadi kultur atau budaya yang mapan, karena budaya tersebut ikut membentuk nilai-nilai, sistem hukum, dan sistem sosial yang berlaku dalam masyarakat. Dibutuhkan sikap terbuka dalam masyarakat Islam dengan memahami nilai-nilai keabadian ajaran-ajaran Islam dalam berbagai aspek kehidupan, batasan pokok prinsip keterbukaan tersebut adalah selama tidak ada indikasi yang menunjukkan sebaliknya. Namun yang menariknya kekuatan hukum adat masyarakat di daerah selalu menjadi ukuran baku dalam sistem hukum kewarisan yang diberlakukan dalam lingkungan masyarakat atau daerah.

Pentingnya memahami pembagian warisan dalam agama Islam adalah untuk menghindari perpecahan atau konflik antar keluarga karena ketika orang tua wafat, anak-anak yang tidak mengenal ilmu waris itu saling berebut harta disebabkan karena parameter yang mereka gunakan saling berbeda. Sedang dalam hukum Islam telah

diatur dalam Al-Qur'an dan Hadits tentang seberapa besar bagian ahli waris berdasarkan tanggung jawab yang diemban.

Hukum waris Islam diatur dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِلْمِثْلَيْنِ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَنْزِرُونَ إِلَيْهِمْ أَقْرَبَ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ ۚ إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Terjemahannya:

“Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bagian anak lelaki sama dengan bagian dua anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya. (Tenang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah.

¹Muh.Sudirman. 2019, *Hukum Kewarisan (Teori dan Praktik)*, Makassar, Penerbit: CV. Bangun Bumitama, Hal.171

*Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.*²

Pembagian harta waris sudah diatur oleh Allah langsung di dalam Al-Qur'an dan dilengkapi serta dijelaskan dengan beberapa Hadits, antara lain tentang ahli waris yang berhak, dan bagian masing-masing ahli waris. Meskipun demikian, dalam masalah pembagian ini pelaksanaannya masih belum sesuai dengan tuntutan dan tuntunan Allah dan Rasulullah Saw.

Masalah yang muncul sekarang ini adalah banyak masyarakat yang tidak memahami ilmu waris, disini lain banyak anggota masyarakat yang tidak mau tahu dengan ilmu waris, sehingga akibatnya mereka membagi harta warisan menurut kehendak mereka sendiri dan tidak berpijak pada cara-cara yang benar menurut Islam. Islam memandang bahwa pembagian harta peninggalan kepada yang berhak mewarisi mewujudkan kasih dan sayang antar keluarga untuk menanggung dan saling menolong dalam kehidupan sesama keluarga. Karena itu Allah memberikan ketentuan-ketentuan-Nya yang baik dan adil dalam Al-Qur'an yang dapat menimbulkan kemaslahatan dalam keluarga.

Di Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone mayoritas masyarakatnya masih menggunakan hukum adat (kekeluargaan) dalam sistem pewarisannya. Secara kultural masyarakat Kecamatan Lappariaja termasuk memiliki sifat religius yang cukup tinggi. Hal ini diindikasikan dengan adanya sarana-sarana pendidikan agama seperti Madrasah, Aliyah dan forum-forum kajian seputar Islam. Namun sebagian besar warganya masih menggunakan hukum adat yang telah turun temurun dilakukan dan membagi harta sebelum meninggalnya pewaris, serta tidak sesuai dengan Hukum Islam.

Inilah yang menjadi alasan penulis mengangkat judul “Persepsi Masyarakat terhadap Pembagian Harta Waris ditinjau dari Hukum Islam di Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone”

TINJAUAN PUSTAKA

1. Tinjauan tentang Persepsi Masyarakat

a. Pengertian Persepsi

Menurut Kreitner dan Kinicki, persepsi adalah merupakan proses kognitif yang memungkinkan kita menginterpretasikan dan memahami sekitar kita. Orang harus mengenal objek untuk berinteraksi sepenuhnya dengan lingkungan mereka.

Persepsi adalah merupakan proses menerima informasi membuat pengertian tentang dunia di sekitar kita. Hal tersebut memerlukan pertimbangan informasi mana perlu diperhatikan, bagaimana mengkategorikan informasi, dan bagaimana menginterpretasikannya dalam kerangka kerja pengetahuan kita yang telah ada.³

Jadi penulis menyimpulkan bahwa Persepsi adalah suatu proses pemahaman dan pengenalan suatu objek atau fenomena untuk dapat berinteraksi dengan lingkungan sekitar.

b. Faktor yang mempengaruhi persepsi

Dalam kenyataan orang-orang dapat melihat pada sesuatu yang sama, namun merasakan sebagai berbeda. Ada beberapa faktor yang membentuk dan kadang-kadang mendistorsi persepsi. Faktor tersebut adalah faktor internal dan faktor eksternal.

Apa yang ada dalam diri individu akan mempengaruhi individu dalam mengadakan persepsi, ini merupakan faktor internal. Selain itu, faktor yang dapat mempengaruhi dalam proses persepsi yaitu faktor stimulus itu sendiri dan faktor lingkungan dimana persepsi berlangsung, dan ini merupakan faktor eksternal.⁴

c. Jenis-jenis Persepsi

²Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Al-Qur'an Raja Fahd, 1971), hal. 116.

³Wibowo.2017, *Perilaku dalam Organisasi*, Jakarta, Penerbit:PT. Rajagrafindo Persada. Hal.66

⁴ Bimo Walgito, 2002, *Psikologi Sosial (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta, ANDI. Hal.46

Persepsi dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan proses pemahaman terhadap rangsangan yang diperoleh indera manusia, antara lain:

1. Persepsi visual, merupakan persepsi yang didapatkan dari indera penglihatan
2. Persepsi auditori, merupakan persepsi yang biasanya paling sering dibicarakan
3. Persepsi peradaban persepsi, merupakan persepsi yang didapatkan dari indera peraba atau kulit
4. Persepsi penciuman, merupakan persepsi yang didapatkan dari indera penciuman atau hidung
5. Persepsi rasa, merupakan persepsi yang didapat dari indera perasa atau pengecap yaitu lidah.

d. Hakikat Persepsi

1. Persepsi merupakan kemampuan kognitif

Persepsi ternyata banyak melibatkan kegiatan kognitif. Pada awal pembentukan persepsi, orang telah menentukan apa yang telah akan diperhatikan. Setiap kali kita memusatkan perhatian lebih besar kemungkinan kita akan memperoleh makna dari apa yang kita tangkap, lalu menghubungkannya dengan pengalaman yang lalu, dan kemudian hari akan diingat kembali.

2. Peran atensi dalam persepsi

Selama kita tidak dalam keadaan tidur, maka sejumlah rangsangan yang besar sekali saling berlomba menurut perhatian kita. Biasanya, manusia dan hewan lainnya akan memilih mana yang rangsangan tersebut yang paling mengesankan. Keterbukaan kita untuk memilih inilah yang disebut dengan atensi atau perhatian.

Beberapa psikologi melihat etensi sebagai jenis alat saringan (*filter*), yang akan menyaring semua informasi pada titik yang berbeda dalam proses persepsi. Sebaliknya, psikolog lain yakni

bahwa manusia mampu memusatkan atensinya terhadap apa yang mereka kehendaki untuk dipersepsikan, dengan secara aktif melibatkan diri mereka dengan pengalaman-pengalaman tanpa menutup rangsangan lain yang saling bersaing.⁵

e. Masyarakat

Istilah yang paling lazim dipakai untuk menyebut kesatuan-kesatuan hidup manusia, baik dalam tulisan ilmiah maupun dalam bahasa sehari-hari, adalah masyarakat.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa:

“Masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama atau kelompok orang yang merasa memiliki bahasa bersama, yang merasa termasuk kelompok itu, atau yang berpegang pada bahasa standar yang sama”.⁶

Koentjaraningrat menjelaskan bahwa : “Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling “bergaul”. Atau dengan istilah ilmiah, saling “berinteraksi”. Suatu kesatuan manusia dapat mempunyai prasarana agar warganya dapat saling berinteraksi”.⁷

Masyarakat merupakan bagian terpenting di dalam suatu negara, dimana merekalah yang menjalankan kehidupan di dalam negara tersebut. Banyak pengertian atau definisi yang diberikan para pakar mengenai masyarakat:

2. Tinjauan tentang Hukum Waris Islam

a. Pengertian hukum waris

Menurut Muhammad Ali Ash-Shabuni, kata waris (*al-mirats*) dalam bahasa Arab adalah bentuk *mashdar* (infinitive) dari

⁵ Abdul Rahman Shaleh, 2004. *Psikologi : Suatu Pengantar dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup. Hal. 111

⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga Cetakan Kedua. 2005 Jakarta : Balai pustaka, Hal. 721

⁷ Koentjaraningrat. 2009. *Pengantar ilmu antropologi*. Jakarta : Rineka Cipta, Hal. 116

kata *waritsa-yaritsu-iritsan-miratsan*. Kata tersebut bermakna “berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari suatu kaum kepada kaum lain”. Bentuk jamak dari kata waris adalah *mawaris*, yang artinya “Harta peninggalan orang meninggal yang akan dibagikan kepada ahli warisnya.

Secara istilah, menurut Wahbah al-Zuhaili, waris atau warisan (*mirats*) sama dengan makna *tirkah* yaitu segala sesuatu yang ditinggalkan oleh seseorang sesudah wafat, baik berupa harta maupun hak-hak yang bersifat materi dan non-materi.⁸ Makna menurut istilah yang dikenal para ulama ialah, berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta (uang), tanah, atau apasaja yang berupa hak milik yang legal secara *syar'i*. Al-Syarbini mendefinisikan fikih mawaris adalah fikih yang berkaitan dengan pembagian harta warisan, pengetahuan tentang cara penghitungan bagian harta warisan dan bagian-bagian yang wajib diterima dari harta peninggalan untuk setiap yang berhak menerimanya. Sedangkan Wirjono Prodjodikoro mendefinisikan waris adalah berbagai aturan tentang perpindahan hak milik seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya⁹

Dalam literatur hukum di Indonesia digunakan pula beberapa nama yang keseluruhannya mengambil dari bahasa Arab, yaitu waris, warisan, pusaka, dan hukum kewarisan. Yang menggunakan nama hukum “waris” memandang kepada orang yang berhak menerima harta warisan, yaitu menjadi subjek dari hukum ini. Adapun yang menggunakan nama “warisan” memandang kepada harta warisan yang menjadi objek dari hukum itu.¹⁰

⁸Muh.Sudirman. 2019, *Hukum Kewarisan (Teori dan Praktik)*, Makassar, Penerbit: CV. Bangun Bumitama, Hal.12

⁹ Suhairi.2015, *Hukum Kewarisan Islam*, Metro: STAIN Metro, Hal.1

¹⁰Amir Syarifuddin. 2015, *Hukum Kewarisan Islam* .Jakarta, Penerbit: Prenadamedia group, Hal.6

b. Dasar dan Sumber Hukum Kewarisan Islam

1) Ayat-ayat Al-Qur'an

a) QS. An-Nisa ayat 7

لِّلرِّجَالِ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Terjemahannya:

“bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan” dalam ayat ini secara tegas Allah menyebutkan bahwa baik laki-laki maupun perempuan merupakan ahli waris.¹¹

2) Al-Hadits

Hadis Nabi Muhammad yang secara langsung mengatur tentang kewarisan adalah sebagai berikut:

Hadits Nabi dari Ibnu Abbas menurut riwayat Al-Bukhari:

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وَهْبٌ حَدَّثَنَا طَاوُسٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ أَنَسٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَلْجَفُو الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ. متفق عليه

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il telah menceritakan kepada kami Wuhaib telah menceritakan kepada kami Ibnu Thawus dari ayahnya dari Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Berikanlah bagian faraid (warisan yang telah ditetapkan) kepada yang berhak, maka bagian yang tersisa bagi pewaris

¹¹Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Al-Qur'an Raja Fahd, 1971), hal. 116.

lelaki yang paling dekat (nasabnya)".
(HR. Bukhari)¹²

c. Unsur-unsur Kewarisan

Proses peralihan harta dari orang yang telah meninggal kepada yang masih hidup dalam kewarisan Islam mengenal tiga unsur, yaitu pewaris, *harta* warisan, dan ahli waris.

1) Pewaris (*Muwarrits*)

Pewaris dalam literatur fiqh disebut *al-muwarrits*, ialah seseorang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan sesuatu yang dapat beralih kepada keluarganya yang masih hidup. Berdasarkan prinsip bahwa peralihan harta dari pewaris kepada ahli waris berlaku sesudah matinya pewaris, maka kata "pewaris" itu sebenarnya tepat untuk pengertian seseorang yang telah mati. Atas dasar prinsip *ijbari*, maka pewaris itu menjelang kematiannya tidak berhak menentukan siapa yang akan mendapatkan harta yang ditinggalkannya itu, karena semuanya telah ditentukan secara pasti oleh Allah. Kemerdekaannya untuk bertindak atas harta itu terbatas pada jumlah sepertiga dari hartanya itu.¹³

2) Ahli waris (*Warits*)

Menurut kompilasi hukum Islam, Ahli waris ialah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.¹⁴ Ahli waris disebut juga *warits* dalam istilah fiqh ialah orang yang berhak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal.¹⁵

Berdasarkan definisi di atas, maka syarat ahli waris yaitu: (1) mempunyai

hubungan darah dengan pewaris, (2) terikat dalam hubungan perkawinan dengan pewaris, (3) seagama dengan pewaris, dan (4) tidak terhalang untuk mendapatkan warisan.

3) Harta Warisan

Harta warisan menurut hukum Islam adalah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris yang secara hukum dapat beralih kepada ahli warisnya.¹⁶ Harta warisan (*mauruts*) yaitu harta benda yang ditinggalkan oleh pewaris yang akan diterima oleh para ahli waris setelah diambil untuk biaya-biaya perawatan, melunasi utang-utang dan melaksanakan wasiat si pewaris.¹⁷

d. Sebab-sebab Mewarisi

Hal-hal yang menyebabkan seseorang dapat mewarisi terbagi atas tiga macam:

- 1) Hubungan Kekerabatan
- 2) Hubungan Perkawinan
- 3) Karena Wala'

e. Asas-asas Hukum Waris Islam

Asas hukum waris Islam terdiri atas:

- 1) Asas Ijbari
- 2) Asas Bilateral
- 3) Asas individual
- 4) Keadilan berimbang
- 5) Akibat kematian

f. Ahli waris dan bagiannya

Ahli waris adalah seseorang atau beberapa orang yang berhak mendapat bagian dari harta peninggalan. Ahli waris terbagi menjadi tiga golongan, yaitu *dzaul furudh*, *ashabah*, *dzawil arham* dengan penjelasan sebagai berikut:

1) Ahli waris Dzaul Furudh

Dalam Al-Quran dan Hadits Nabi disebutkan bagian-bagian tertentu dan disebutkan pula ahli-ahli waris dengan bagian tertentu itu. Bagian tertentu itu dalam Al-Quran yang disebut Furudh adalah dalam angka pecahan yaitu 1/2, 1/3, 1/4, 1/8, 1/6, dan 2/3.

¹² Shahih Bukhari hadis nomor 6235 dalam Lidwa Pusaka i-Software- Kitab 9 Imam Hadis. Lihat juga Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Ali, *Terjemah Bulughul Maram*, (Surabaya: Mutiara Ilmu, 1995) Hal. 403

¹³ Moh. Muhaibbin. 2009, *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta, Penerbit: Sinar Grafika, Hal. 213

¹⁴ Ibid. Hal. 38

¹⁵ Amir Syarifuddin. 2015, *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta, Penerbit: Prenadamedia group, Hal. 219

¹⁶ Ibid. Hal. 215

¹⁷ Mardani. 2014, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta, Penerbit: PT Rajagrafindo persada, Hal. 25

2) Ahli waris ashabah

Adanya ketentuan ahli waris yang mendapat bagian seluruh harta atau sisa harta secara pembagian terbuka yang pada umumnya adalah laki-laki, dikembangkan kepada ahli waris laki-laki yang lain yang tidak disebutkan dalam Al-Quran atau Hadits Nabi. Kelompok kerabat anak laki-laki dalam bahasa Arab disebut Ashabah. laki-laki berhak atas seluruh harta atau sisa harta menurut Ahlu Sunnah, maka selanjutnya kata Ashabah itu digunakan untuk ahli waris yang berhak atas seluruh harta atau sisa harta setelah diberikan kepada ahli waris *dzaul Furudh*.

3) Ahli waris Dzaul Arham

Ahli waris *dzaul Arham* dapat diartikan sebagai ahli waris dalam hubungan kerabat. Pembagian mula-mula diberikan

METODE PENELITIAN

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

a. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu pendekatan Kualitatif yang bertujuan untuk memahami persepsi masyarakat terhadap pembagian harta waris ditinjau dari hukum Islam. Dalam penelitian ini data yang dihasilkan berupa data yang diperoleh dari sumber dan informasi yang dapat dipertanggung jawabkan.

Alasan peneliti menggunakan pendekatan Kualitatif adalah karena dalam penelitian ini data yang dihasilkan berupa data deskriptif yang diperoleh dari data-data yang berupa tulisan, kata-kata dan dokumen yang berasal dari sumber atau informan yang diteliti dan dapat dipercaya. Alasan lain mengapa menggunakan pendekatan ini karena data yang dikumpulkan dianggap sangat bermanfaat dalam membantu menyelesaikan atau memecahkan masalah-masalah yang timbul dalam kehidupan sehari-hari.

b. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif yang

kepada *dzaul furudh*, kemudian harta selebihnya diberikan kepada ahli waris *ashabah*. Jika masih ada harta yang tertinggal, maka kelebihan tersebut diberikan kepada kerabat lain yang disebut *dzaul Arham*.

g. Penghalang memperoleh kewarisan

Di antara ahli waris ada yang tidak patut dan tidak berhak mendapat bagian waris dari pewarisnya karena beberapa penyebab, yaitu:

- 1) Ahli waris yang membunuh pewaris, tidak berhak mendapat warisan dari keluarga yang dibunuhnya
- 2) Orang yang murtad tidak berhak mendapat warisan dari keluarganya yang beragama Islam, demikian sebaliknya
- 3) Orang kafir tidak berhak menerima warisan dari keluarga yang beragama Islam.

bertujuan untuk menggambarkan persepsi masyarakat terhadap pembagian harta waris ditinjau dari hukum Islam, dengan mengumpulkan informasi yang terperinci melalui prosedur pengumpulan data.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Sengeng Palie, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone. Pemilihan Desa Sengeng Palie sebagai lokasi penelitian didasarkan atas beberapa pertimbangan tertentu. Pertimbangan pertama adalah masih kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pembagian harta waris.

Alasan lain yang menjadi pertimbangan adalah unsur keterjangkauan lokasi penelitian oleh peneliti, baik dilihat dari segi tenaga, dana maupun dari segi efisiensi waktu. Pelaksanaan penelitian di lokasi yang dipilih tidak menimbulkan masalah dalam kaitannya dengan kemampuan peneliti, itu dikarenakan lokasi penelitian merupakan kampung halaman peneliti.

3. Tahap-tahap Kegiatan Penelitian

Ada tiga tahap dalam penelitian ini yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan, dan laporan penelitian:

1. Tahap Perencanaan

Adapun langkah-langkah penelitian yang termasuk dalam tahap perencanaan yaitu sebagai berikut:

- a. Penentuan atau pemilihan masalah
- b. Latar belakang
- c. Perumusan masalah
- d. Tujuan dan manfaat penelitian
- e. Tinjauan pustaka dan kerangka konsep
- f. Perumusan metode penelitian

Pada dasarnya hasil dari tahap perencanaan ini adalah rancangan penelitian yang sistematis penulisannya mencakup langkah di atas, penulisan rancangan penelitian harus:

- a. Mencakup kegiatan yang akan dilakukan
- b. Menuruti susunan yang sistematis dan logis
- c. Membatasi hal-hal yang tidak diperlukan
- d. Memperkirakan hasil yang akan dicapai

2. Tahap Pelaksanaan

Adapun langkah-langkah dalam tahap pelaksanaan yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Pengumpulan data
- b. Pengelolaan data
- c. Analisis data
- d. Penafsiran hasil data

Kegiatan selanjutnya adalah melakukan tugas lapangan dalam rangka mengumpulkan data untuk diproses. Proses ini meliputi penyuntingan dan analisis sebagai dasar penulisan laporan dan penarikan kesimpulan.

3. Tahap Penulisan Laporan Penelitian

Penulisan laporan merupakan tahap akhir dari rangkaian proses penelitian. Tahap ini yaitu membuat laporan mengenai hasil penelitian secara tertulis. Laporan secara tertulis perlu dibuat agar peneliti dapat mengkomunikasikan hasil penelitiannya kepada para pembaca.

HASIL PENELITIAN

Sesuai dengan judulnya, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat terhadap pembagian

harta waris Islam. Sebagaimana kita ketahui waris adalah soal apakah dan bagaimanakah pelbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang yang masih hidup. dalam istilah lain, waris disebut juga dengan *fara'idh*, yang artinya bagian tertentu yang dibagi menurut agama Islam kepada semua yang berhak menerimanya.

Al-Quran telah menjelaskan hukum-hukum kewarisan dan ketentuan-ketentuan bagi setiap ahli waris dengan penjelasan yang lengkap dan sempurna tanpa meninggalkan bagian seseorang atau membatasi benda yang akan diwariskan. Al-Qur'an merupakan landasan bagi hukum waris dan ketentuan bagiannya yang dilengkapi dengan sunnah dan Ijma. Hukum Islam telah diterapkan dalam beberapa kitab perundang-undangan dan pemerintah guna dapat memenuhi kebutuhan hukum masyarakat.

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat di Desa Sengeng Palie Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone. Informan dalam penelitian ini adalah 8 orang. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara.

1. Pemahaman masyarakat terhadap pembagian harta waris Islam di Desa Sengeng Palie

Untuk mengetahui pemahaman masyarakat tentang pembagian harta waris Islam, dilakukan wawancara informan dengan menanyakan tentang apakah dalam Islam diatur pembagian harta waris, unsur-unsur kewarisan, siapa yang berhak menjadi ahli waris, bagian tiap-tiap ahli waris, sebab seseorang tidak memperoleh harta warisan, dan dari mana memperoleh pelajaran tentang harta waris Islam.

Pembagian harta waris sudah diatur oleh Allah langsung di dalam QS. An-Nisa ayat 12 dan 176. Dijelaskan pula dalam beberapa hadits Nabi Muhammad SAW, selain itu diatur pula dalam Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa tidak semua orang memahami pembagian harta waris secara

hukum Islam, hal ini dipengaruhi oleh minimnya pendidikan dan sosialisasi tentang pembagian harta waris Islam di masyarakat. Selain karena tingkat pendidikan yang minim, hukum waris Islam juga sulit dipahami karena banyaknya ketentuan dan tata cara yang harus dijelaskan oleh para Ulama atau orang sudah paham secara mendalam hukum kewarisan Islam.

2. Sikap masyarakat terhadap pembagian harta waris Islam di Desa Sengeng Palie

Eksistensi hukum waris di tengah masyarakat Indonesia memiliki tempat tersendiri yang sangat berperan dalam peristiwa-peristiwa kewarisan. Hal tersebut ditunjukkan dalam prakteknya masih banyak masyarakat Muslim Indonesia yang tidak menerapkan hukum kewarisan Islam dalam pembagian warisan, mereka lebih memilih menyelesaikan perkara warisan menggunakan hukum adat daripada hukum Islam atau konvensional, karena menganggap hukum waris adat lebih bisa memberikan keadilan bagi ahli waris.

Peneliti ingin mencari data untuk mengetahui bagaimana sikap masyarakat Desa Sengeng Palie sebagai orang Islam dalam menanggapi pembagian harta waris dengan cara hukum Islam.

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat Desa Sengeng Palie dapat disimpulkan bahwa selaku umat Islam setuju dengan pembagian harta waris diatur dalam Hukum Islam, namun sulit diimplementasikan karena tidak paham dengan ketentuan dan tata caranya, baik itu sebab seseorang menjadi ahli waris, unsur-unsur kewarisan dan sebab-sebab seseorang terhalang memperoleh harta waris. Sehingga masyarakat lebih memilih menggunakan pembagian harta waris adat (kekeluargaan), cara pembagian yang orang tua dan leluhur mereka telah gunakan dari dulu, dan mereka sekeluarga sudah sama-sama paham dengan cara tersebut serta dapat mencegah terjadinya ketidakadilan serta perselisihan dalam keluarga.

Berikut adalah contoh kasus diatas apabila diselesaikan dengan menggunakan cara pembagian harta waris Islam.

Ibu Naha meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris seorang suami, ayah, ibu, 2 orang anak perempuan dan 1 orang anak laki-laki, meninggalkan harta warisan sebanyak 3 petak sawah dengan luas 8.100 m^2 , 2 petak lahan rumah dengan luas 600 m^2 dan sepetak kebun dengan luas 2.000 m^2 . Maka, penyelesaiannya adalah sebagai berikut:

Berdasarkan pembagian harta waris dengan cara Islam di atas dapat diperoleh data mengenai bagian masing-masing ahli waris. Jumlah luas tanah harta waris adalah 10.700 m^2 , Suami memperoleh harta sebanyak $\frac{1}{4}$ bagian atau seluas 2.675 m^2 , Ibu dan Ayah masing-masing mendapatkan $\frac{1}{6}$ bagian atau masing-masing memperoleh seluas 1.783 m^2 , Anak Laki-laki dan 2 anak perempuan mendapatkan ahashbah. 2 anak perempuan masing-masing memperoleh seluas 1.114 m^2 , serta anak laki-laki memperoleh seluas 2.229 m^2 .

PEMBAHASAN

1. Pemahaman masyarakat terhadap pembagian harta waris Islam di Desa Sengeng Palie

Berdasarkan hasil penelitian, informan masyarakat masih banyak yang belum memahami pembagian harta waris Islam, mereka hanya sekedar tahu bahwa dalam Islam diatur pula pembagian harta waris, yang mereka tahu adalah dalam Islam bagian laki-laki lebih banyak dibanding bagian perempuan, yang menjadi ahli waris adalah anak, serta pembagiannya dilakukan setelah meninggal pewaris. Umumnya mereka mengetahui hal tersebut melalui berbagai kegiatan keagamaan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sekolah serta perguruan tinggi. mereka mengetahui bahwa dalam Al-Qur'an dan Alhadits ada hukum yang mengatur masalah kewarisan. Namun ada pula yang tidak tahu sama sekali tentang pembagian harta waris yang diatur dalam Hukum Islam, hal ini karena faktor

pendidikan dan pengetahuan yang minim. Imam Desa Sengeng Palie Bapak Cirua berpendapat bahwa hukum waris Islam sangat sulit untuk dipahami dan diajarkan kepada siswa begitupun kepada masyarakat. Sehingga itu menjadi alasan kenapa masyarakat Desa Sengeng Palie sebagian besar bahkan hampir seluruhnya lebih memilih menggunakan pembagian harta waris dengan cara kekeluargaan yang sudah sama-sama mereka pahami agar tidak terjadi perselisihan.

Masyarakat yang tahu tentang pembagian harta waris Islam belum melaksanakan pembagian harta waris keluarganya dengan cara Islam, karena anggota keluarga yang lain tidak terima dengan cara tersebut dengan alasan tidak paham. Sehingga pembagiannya tetap menggunakan cara kekeluargaan yang dibagi secara merata kepada anak laki-laki maupun anak perempuan. Cara ini dianggap lebih baik agar tidak terjadi sesuatu yang menimbulkan perpecahan dan rasa ketidakadilan.

2. Sikap masyarakat terhadap pembagian harta waris Islam di Desa Sengeng Palie

Sebagian kecil masyarakat yang tingkat pengetahuannya lebih tinggi akan menggunakan hukum waris Islam dalam menyelesaikan masalah kewarisannya, selain menghindari percekocokan juga mentaati dan melaksanakan ajaran agama. Penulis mengatakan sebagian kecil karena pada kenyataannya yang terjadi saat ini masyarakat yang mempunyai pengetahuan keagamaan yang lebih tinggi pula juga memilih membagi harta warisan sesuai kesepakatan pewaris, dengan alasan untuk kemaslahatan bersama. Begitu pula dengan masyarakat yang minim pendidikan dan pengetahuannya tentang waris Islam, sudah pasti tidak menggunakan pembagian harta waris dengan cara Islam.

Adat kebiasaan sudah banyak berlaku pada masyarakat dari berbagai penjuru dunia sebelum adanya ajaran Islam. Adat kebiasaan yang dibangun oleh nilai-nilai yang dianggap baik dari masyarakat itu

sendiri, yang kemudian diciptakan, dipahami, disepakati, dan dijalankan atas dasar kesadaran. Nilai-nilai yang dijalankan terkadang tidak sejalan dengan ajaran Islam dan ada pula yang sudah sesuai dengan ajaran Islam.

Agama Islam sebagai agama yang penuh rahmat menerima adat dan budaya selama tidak bertentangan dengan syari'at Islam dan kebiasaan tersebut telah menjadi suatu ketentuan yang harus dilaksanakan dan dianggap sebagai aturan atau norma yang harus ditaati, maka adat tersebut dapat dijadikan pijakan sebagai suatu hukum Islam yang mengakui keefektifan adat istiadat dalam interpretasi hukum.

KESIMPULAN

1. Pemahaman masyarakat terhadap pembagian harta waris Islam ialah masyarakat kurang memahami pembagian harta waris Islam, karena tidak semua masyarakat memiliki pendidikan yang tinggi dan mempelajari lebih mendalam tentang hukum kewarisan Islam, serta kurangnya sosialisasi tentang pembagian harta waris Islam. Selain karena tidak semua masyarakat memiliki pendidikan yang tinggi, hukum waris Islam juga sulit dipahami karena banyaknya ketentuan dan tata cara yang harus dijelaskan oleh para Ulama atau orang sudah paham secara mendalam hukum kewarisan Islam. Tata cara dan ketentuan yang dimaksud adalah unsur-unsur kewarisan, sebab seseorang menjadi ahli waris, sebab seseorang terhalang untuk memperoleh harta waris dan besar bagian setiap ahli waris.
2. Sikap masyarakat terhadap pembagian harta waris Islam ialah Pembagian harta waris dengan cara Islam baik digunakan jika dipahami ketentuan dan tata caranya yang berupa unsur-unsur kewarisan, sebab seseorang menjadi ahli waris, besar bagian setiap ahli waris, sebab seseorang terhalang memperoleh harta waris dan waktu pelaksanaan pembagian

harta waris. Masyarakat sulit memahami cara pembagian waris Islam dan lebih memilih menggunakan pembagian waris dengan cara kekeluargaan. Karena mudah dipahami dan sebagian ahli waris paham dengan cara tersebut, sehingga dapat meminimalisir tingkat perselisihan dan rasa ketidakadilan pada saat pembagian harta waris. Masyarakat setuju dengan perbandingan bagian yang didapatkan laki-laki lebih banyak dibanding perempuan dengan alasan laki-laki yang memiliki tanggung jawab besar terhadap anak dan istrinya. Serta lebih setuju menggunakan metode penunjukan harta untuk bagian masing-masing ahli waris sebelum meninggal dunia, dan akan dimiliki sepenuhnya setelah pewaris meninggal dunia.

SARAN

Berdasarkan permasalahan dalam penelitian ini, penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Mengingat hukum waris Islam sangat penting untuk dikembangkan maka kepada masyarakat Islam umumnya disarankan untuk dapat mempelajari, memahami dan menerapkan pembagian harta waris sesuai dengan tata cara dan ketentuan syariat Islam.
2. Kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat hendaknya mampu memberikan penyuluhan tentang hukum kewarisan Islam.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Abdul, Rahman, Shaleh. 2004. *Psikologi: Suatu Pengantar dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.

Al-Qur'an dan Terjemahannya, 1971. Jakarta: Departemen Agama RI

Anonim. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga Cetakan Kedua*. 2005 Jakarta :Balai pustaka.

Fakultas Ilmu Sosial. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Universitas Negeri Makassar

Gunawan, 2000, *Sosiologi Pendidikan (suatu analisis sosiologi tentang pelbagai problem pendidikan)*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Husein, Amin Nasution. 2012, *Hukum Kewarisan*. Jakarta, Penerbit: PT Rajagrafindo Persada.

Jamil Bin Abu Dawud II, al-Tirmizi, Ibnu Majjah dan Ahmad, *Sunan Abi Dawud II*, Cairo: Mustafa al Babiy,

Koentjaraningrat. 2009. *Pengantar ilmu antropologi*. Jakarta : Rineka Cipta

Mardani. 2014, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* .Jakarta, Penerbit: PT Rajagrafindo persada

Muhaibbin, M. 2009, *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta, Penerbit: Sinar Grafika.

Munawir Syadzali. 1995. *Dari Lembah Kemiskinan : Kontekstual ajaran Islam*. Jakarta: IPHI dan Paramadina.

Shahih Bukhari hadis nomor 6235 dalam Lidwa Pusaka i-Software Kitab 9 Imam Hadis. 1995. *Bulughul Maram*, Surabaya: Mutiara Ilmu.

Sudirman, M., & Mustaring. 2019. *Hukum Kewarisan (Teori dan*

Praktik), Makassar, Penerbit:
CV. Bangun Bumitama.

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta,cv.

Suhairi.2015, *Hukum Kewarisan Islam*, Metro: STAIN Metro

Suparman, Eman. 2007, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*.Bandung, Penerbit: PT Refika Aditama

Syarifuddin, Amir. 2015, *Hukum Kewarisan Islam* .Jakarta, Penerbit: Prenadamedia group.

Walgito, Bimo, 2002, *Psikologi Sosial (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta, ANDI

Wibowo,2017, *Perilaku dalam Organisasi*, Jakarta, Penerbit:PT. Raja Grafindo Persada.

2. Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945